

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Guru bahasa dan sastra Sunda termasuk bagian dari masyarakat Sunda yang berperan sebagai pendidik dan pengajar di sekolah. Peran guru bahasa Sunda berkaitan erat dengan pembinaan pemakaian bahasa Sunda yang baku. Oleh karena itu, guru bahasa Sunda perlu ditingkatkan dan dikembangkan kompetensinya, antara lain, melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan.

Sebuah bahasa akan terus tumbuh dan berkembang selama digunakan oleh masyarakat penuturnya. Apabila masyarakat pendukungnya sudah tidak mau lagi menggunakannya, bahasa tersebut akan musnah dari kehidupan. Begitu pula bahasa daerah yang ada di Indonesia, termasuk bahasa daerah di Jawa Barat, antara lain, bahasa Sunda. Agar bahasa daerah tetap hidup, perlu adanya kegiatan pembinaan dan pengembangan dengan tujuan, antara lain, masyarakatnya memiliki sikap yang baik terhadap bahasa daerah (Sunda). Pembinaan dan pengembangan bahasa daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, melalui pengajaran secara formal di sekolah-sekolah. Cara seperti ini termasuk yang paling efektif dan efisien karena kegiatannya dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi, sehingga hasilnya dapat terukur. Pendidikan bahasa daerah (Sunda) di Jawa Barat dilaksanakan di SD/MI dan SMP/MTs, beberapa SMA/SMK seperti YAS dan YPDM Pasundan serta Perguruan Tinggi seperti UPI, UNPAD, dan UNPAS.

Program pelaksanaan pengajaran bahasa daerah (Sunda) berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. Dinas ini memiliki balai yang khusus mengkaji dan mengembangkan bahasa daerah di Jawa Barat, yakni Balai

Pengembangan Bahasa Daerah (BPBD). Salah satu wujud perhatiannya ialah mengadakan pengkajian bahasa daerah serta pengajarannya pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs).

Mengenai bahasa daerah di Jawa Barat dijelaskan dalam Perda Kebudayaan Propinsi Jawa Barat, yakni Perda Nomor 5 Tahun 2003 tentang “Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah” bahwa “Bahasa daerah adalah bahasa Sunda, Cirebon, dan Melayu-Betawi yang tumbuh dan berkembang di wilayah Jawa barat” (Bab I, Pasal 1 (7)). bahasa Sunda termasuk bahasa daerah di Jawa barat, yang merupakan bahasa daerah terbesar kedua di Indonesia setelah bahasa jawa. Wilayah pemakaiannya hampir seluruh Jawa Barat, kecuali wilayah Cirebon yang menggunakan bahasa Cirebon, sebagian Bogor, Depok, dan Bekasi, yang menggunakan bahasa melayu-Betawi.

Bergamitan dengan kegiatan membina dan mengembangkan bahasa daerah, di dalam *Seminar Politik Bahasa Nasional* tahun 1975 di Jakarta disimpulkan bahwa “Pengembangan pengajaran bahasa daerah bertujuan untuk meningkat-kan mutu pengajaran bahasa daerah sedemikian rupa sehingga penuturnya memiliki (1) keterampilan berbahasa daerah, (2) pengetahuan yang baik mengenai bahasa daerah, dan (3) sikap positif terhadap bahasa daerah dan sastranya. Pengajaran bahasa daerah adalah sarana yang ikut: (a) menunjang pembinaan unsur kebudayaan nasional, (b) mengarahkan perkembangan bahasa daerah, dan (c) membakukan ragam bahasa daerah” (Halim, 1980).

Memang pembinaan dan pengembangan bahasa daerah di Jawa Barat, dalam hal ini pengajaran bahasanya, masih menyimpan banyak permasalahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Sudaryat (2001:92) dalam Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) I di Bandung bahwa “Pengajaran bahasa daerah (Sunda) di sekolah berfungsi penting dalam kehidupan sosial budaya Sunda karena termasuk cara yang efektif dalam memelihara, membina, dan mengembangkan bahasa, sastra, dan sosial budaya Sunda. Penghilangan pengajaran bahasa Sunda di sekolah akan menimbulkan kerugian. Dalam

pelaksanaan pengajaran bahasa Sunda sekarang ditemukan adanya masalah, antara lain, (1) kurangnya guru yang professional, (2) kurangnya minat dan sikap pelajar, (3) ketidakberhasilan proses belajar mengajar, (4) isi kurikulum dan bahan ajar, dan (5) lingkungan pengajaran.”

Informasi lain diperoleh dari hasil identifikasi dan pengkajian bahasa daerah di Jawa Barat yang dilaksanakan oleh BPBD Disdik Jawa Barat tahun 2004 bahwa permasalahan pengajaran bahasa daerah di Jawa Barat masih berkisar pada berbagai komponen pengajaran, antara lain, kurikulum dan bahan ajar, guru dan murid, metode dan teknik pengajaran, media dan sumber belajar, serta sistem evaluasi. Padahal keberhasilan pengajaran bahasa, termasuk pengajaran bahasa Sunda, sebagaimana diungkapkan oleh Stevens, dalam Long & Richards (1987), ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain, (1) hasrat peserta didik, (2) harapan yang tinggi akan keberhasilan belajar, (3) tujuan yang realistis dan dapat dicapai, (4) silabus yang sesuai, (5) organisasi pengajaran dan situasi belajar yang memadai, (6) waktu yang cukup, (7) bahan ajar yang membantu, (8) guru yang terlatih, dan (9) penampilan profesionalisme guru dan pembimbingan siswa.

Di dalam kaitannya dengan sikap guru-guru Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs) di Jawa Barat terhadap penggunaan dan pengajaran bahasa Sunda, sangat perlu dilaksanakan pengkajian terhadap masalah tersebut. Hal ini mengingat derasnya arus teknologi dan informatika (misalnya, duniamaya atau sibernet), perpindahan penduduk luar ke wilayah Jawa Barat, berkurangnya luas wilayah Jawa Barat setelah berdirinya Propinsi Banten, dan pengaruh bahasa-bahasa daerah lain yang berbatasan dengan Jawa Barat (misalnya, wilayah Bodebek, wilayah Pantura). Sementara pengajaran termasuk salah satu media yang paling efektif dan efisien dalam membina dan mengembangkan bahasa daerah di Jawa Barat.

1.2 Masalah

Pengkajian ini menyangkut kegiatan peningkatan mutu guru dalam pemahaman bahasa, sastra, dan aksara daerah di Jawa Barat. Berkaitan dengan kegiatan tersebut, terdapat beberapa masalah yang perlu dirumuskan. Rumusan masalah itu dapat dikemukakan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

- a. Berapa frekuensi kegiatan pelatihan bahasa daerah di tingkat provinsi yang diikuti oleh guru?
- b. Apakah diklat bahasa daerah di tingkat provinsi masih perlu dilakukan?
- c. Apakah pelatihan bahasa daerah di tingkat provinsi bermanfaat bagi Saudara?
- d. Apakah kegiatan apresiasi bahasa dan seni daerah di tingkat provinsi masih perlu dilanjutkan?
- e. Apakah hasil pelatihan bahasa daerah telah diterapkan di sekolah?
- f. Bagaimana pengiriman peserta pelatihan bahasa daerah di tingkat Provinsi?
- g. Ke mana arah pelatihan bahasa daerah yang Saudara perlukan?
- h. Siapa sebaiknya instruktur pelatihan bahasa daerah di tingkat provinsi?
- i. Bagaimana mutu pelaksanaan pelatihan bahasa daerah tingkat Jawa Barat?
- j. Apakah perlu pelatihan bahasa daerah dilaksanakan secara bergiliran di tiap kabupaten/kota?

1.3 Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pengkajian mengenai peningkatan dan pengembangan mutu guru dalam pemahaman bahasa, sastra, dan aksara daerah di sekolah di Jawa Barat. Unsur-unsur yang dideskripsikannya berkaitan dengan (a) frekuensi kegiatan pelatihan bahasa daerah di tingkat provinsi; (b) perlunya pendidikan dan pelatihan bahasa daerah di tingkat provinsi; (c) manfaat pelatihan bahasa daerah di tingkat provinsi; (d) keberlanjutan kegiatan apresiasi bahasa dan seni daerah di tingkat provinsi; (e) penerapan hasil pelatihan bahasa daerah di sekolah; (f) pengiriman peserta pelatihan bahasa daerah ke tingkat provinsi; (g) arah pelatihan bahasa daerah yang diperlukan; (h) instruktur

pelatihan bahasa daerah di tingkat provinsi; (i) mutu pelaksanaan pelatihan bahasa daerah tingkat provinsi; dan (j) pelatihan bahasa daerah dilaksanakan secara bergiliran di tiap kabupaten/kota.

1.4 Manfaat Pengkajian

Hasil pengkajian ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain, bagi pengembangan bahasa daerah, bagi pengajaran bahasa daerah, dan bagi perencanaan bahasa daerah serta pengajarannya di Jawa Barat.

Pertama, bagi pengembangan bahasa daerah, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber informasi dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan bahasa daerah.

Kedua, bagi pengajaran bahasa daerah, hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk memperkaya sumber-sumber informasi mengenai sikap bahasa dan pengajaran bahasa daerah para praktisi di lapangan.

Ketiga, bagi perencanaan bahasa daerah serta pengajarannya, hasil pengkajian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber strategi perencanaan bahasa di Jawa Barat.

1.5. Metode dan Teknik Pengkajian

1.5.1 Penentuan Sumber Data

Lokasi pengkajian ini ialah seluruh sekolah (SD dan SMP) yang tersebar di wilayah Propinsi Jawa Barat. Propinsi Jawa Barat meliputi 25 daerah pemerintahan, yang terdiri atas 17 kabupaten dan 9 kota, yang seluruhnya mencakup 595 kecamatan. Secara geo-kultural akan dibedakan enam wilayah Jawa Barat, yakni (1) Priangan Timur, (2) Priangan Tengah (Bandung Raya), (3) Priangan Barat (Sukaci), (4) Purwasuka, (5) Bodebek, dan (6) Cirebon.

Subjek pengkajian ini adalah sikap praktisi (guru SD dan SMP) terhadap bahasa daerah dan pengajaran bahasa daerah (Sunda) di Jawa Barat. Sumber data penelitian ini ialah guru-guru SD dan guru-guru bahasa Sunda SMP di Jawa Barat.

Seluruh sumber data itu dijadikan populasi. Tidak semua populasi dijadikan sumber data, tetapi diambil sebagian sebagai sampel. Pengambilan sampel dilakukan dengan *teknik stratifikasi purposif*, dengan langkah-langkah berikut.

- (1) Seluruh wilayah di Jawa Barat, yang terdiri atas 25 kabupaten/kota atau 211 kecamatan, dijadikan wilayah populasi (lihat Tabel 1).
- (2) Penelitian ini tidak dilakukan secara sensus, tetapi tiap kabupaten atau kota ditentukan 9 orang guru, yang masing-masing 3 guru (SD, SMP, dan SMA).

Tabel 1: WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT

No.	Wilayah	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan
1.	Priangan Timur	Kota Banjar	4
		Kabupaten Ciamis	30
		Kabupaten Tasikmalaya	6
		Kota Tasikmalaya	7
		Kabupaten Garut	8
2.	Priangan Tengah (Bandung Raya)	Kabupaten Bandung	10
		Kota Bandung	11
		Kota Cimahi	11
		Kabupaten Sumedang	6
		Kabupaten Bandung Barat	10
3.	Priangan Barat (Sukaci)	Kabupaten Sukabumi	5
		Kota Sukabumi	10
		Kabupaten Cianjur	15
4.	Purwasuka	Kabupaten Purwakarta	8
		Kabupaten Karawang	8
		Kabupaten Subang	4
5.	Bodebek	Kabupaten Bogor	9
		Kota Bogor	8
		Kota Depok	11
		Kabupaten Bekasi	6
		Kota Bekasi	8
6.	Cirebon	Kabupaten Cirebon	7
		Kota Cirebon	5
		Kabupaten Indramayu	6
		Kabupaten Kuningan	6
		Kabupaten Majalengka	8
Jumlah		25	211

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan *metode deskriptif* dengan penekanan pada *studi lapangan*. Unsur yang diidentifikasi ialah peningkatan dan pengembangan guru bahasa daerah di SD dan SMP.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui tahap-tahap berikut.

- (1) Mengumpulkan ketua MGMP, KKG, dan wakil KCD kabupaten/kota.
- (2) Menjelaskan kriteria penentuan guru SD-SMP sebagai informan.
- (3) Membagikan angket kepada wakil kabupaten/kota.
- (4) Mengumpulkan angket dari tiap-tiap kabupaten/kota di Jawa Barat.

1.5.3. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam identifikasi ini ialah *angket* atau *daftar tanya*. Angket digunakan karena jenis dan sumber data serta responden yang diperlukan cukup banyak. Di dalam identifikasi ini digunakan jenis (1) *angket berstruktur*, yakni angket yang berisi daftar tanya dengan alternatif jawaban. Meskipun begitu, dalam beberapa daftar tanya terdapat (2) *angket tak berstruktur* karena responden harus menjawab daftar tanya secara bebas.

1.5.4. Teknik Pengolahan Data

Data pengajaran bahasa daerah yang telah terkumpul akan diperiksa, diidentifikasi, disusun, diolah, dan ditafsirkan sebagai bahan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk kepentingan pengolahan data, terutama data kuantitatif, digunakan *statistika deskriptif*, yang berupa *tabel* dan perhitungan nilai kecenderungan memusat seperti *persentase*.

Prosedur pengolahan data dilakukan melalui tahap-tahap berikut.

- (1) Pemilahan data atas lima hal, yakni:
 - (2) Analisis sikap praktisi terhadap bahasa daerah; dan silabus pengajaran, metodologi, bahan ajar, dan evaluasi pengajaran.
- (3) Pemaparan, penafsiran, dan penyimpulan sikap praktis terhadap bahasa daerah.

BAB II
KEGIATAN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
BAHASA DAN SENI DAERAH
DI JAWA BARAT

2.0 Pengantar

Di dalam bab ini dipaparkan sepuluh hal pokok sebagai hasil kajian terhadap kegiatan peningkatan dan pengembangan bahasa dan seni daerah di Jawa Barat. Kesepuluh hal pokok itu berkaitan dengan sikap praktisi terhadap bahasa daerah dan pengajaran bahasa daerah, yakni (1) peran serta dalam penataran, (2) urgensi pendidikan dan pelatihan bahasa daerah di provinsi, (3) manfaat diklat bahasa daerah di provinsi, (4) urgensi kegiatan apresiasi bahasa dan seni daerah di provinsi, (5) penerapan hasil diklat bahasa daerah di sekolah, (6) pengiriman peserta diklat bahasa daerah ke provinsi, (7) arah diklat bahasa daerah, (8) instruktur diklat bahasa daerah, (9) mutu pelaksanaan diklat bahasa daerah, dan (10) pelaksanaan diklat bahasa daerah secara bergiliran di kabupaten/kota. Kesepuluh aspek peningkatan bahasa, sastra, dan seni daerah dipaparkan masing-masing sebagai berikut.

2.1. Peningkatan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Daerah

Bahasa dan sastra daerah merupakan salah satu perwujudan masyarakatnya. Bahasa daerah dipakai oleh masyarakat penuturnya. Dalam pemakaiannya, bahasa daerah bisa produktif, sedang-sedang saja, atau kurang. Selama ini, kegiatan berbahasa dan berastra Sunda dalam keadaan lesu sehingga perlu ditingkatkan pemakaiannya. Berikut ini upaya peningkatan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah di sekolah-sekolah di Jawa Barat.

2.1.1. Peran serta Guru dalam Penataran

Frekuensi guru dalam mengikuti penataran diduga dapat meningkatkan mutu guru dalam pemahaman bahasa, sastra, dan aksara daerah di sekolah. Peran serta guru-guru dalam penataran bahasa dan sastra Sunda rata-rata menyatakan sering (31,53%), dua kali (24,63%), satu kali (30,54%), dan belum pernah ikut (13,30%).

Tabel 2: Peranserta Guru dalam Penataran

No	Kab/Kota	ASPEK				F
		A	B	C	D	
1.	Kab. Bogor	2	1	3	2	8
2.	Kota Bogor	-	4	2	2	8
3.	Kota Depok	3	1	-	3	7
4.	Kab. Bekasi	1	1	3	1	6
5.	Kota Bekasi	4	2	-	2	8
6.	Kab. Sukabumi	3	-	1	1	5
7.	Kota Sukabumi	-	5	4	1	10
8.	Kab. Cianjur	2	7	5	1	15
9.	Kab. Purwakarta	-	1	7	-	8
10.	Kab. Subang	-	5	2	1	8
11.	Kab. Karawang	-	-	4	-	4
12.	Kab. Bandung	2	1	2	5	10
13.	Kota Bandung	2	4	1	5	12
14.	Kab. Bandung Barat	2	3	1	2	8
15.	Kota Cimahi	1	4	3	2	10
16.	Kab. Sumedang	-	-	2	4	6
17.	Kab. Garut	-	-	3	5	8
18.	Kab. Tasikmalaya	1	1	-	4	6
19.	Kota Tasikmalaya	2	1	-	4	7
20.	Kab. Ciamis	1	3	5	-	9
21.	Kota Banjar	-	2	-	7	9
22.	Kab Majalengka	-	3	-	5	8
23.	Kab. Kuningan	-	-	6	-	6
24.	Kab. Cirebon	-	-	3	1	4
25.	Kota Cirebon	-	-	5	2	7
26.	Kab. Indramayu	1	1	-	4	6
J u m l a h		27	50	62	64	203
%		13,30%	24,63%	30,54%	31,53%	100,00%

2.1.2. Urgensi Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Daerah di Provinsi

Guru-guru menyatakan bahwa pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bahasa dan sastra daerah di tingkat provinsi masih sangat perlu dilakukan (65,48%), perlu (29,17%), cukup perlu (4,67%), dan tidak perlu (0,60%).

Tabel 3: Urgensi Pendidikan dan Pelatihan Bahasa Daerah di Provinsi

No	Kab/Kota	ASPEK				F
		A	B	C	D	
1.	Kab. Bogor	-	1	1	6	8
2.	Kota Bogor	-	-	1	7	8
3.	Kota Depok	-	-	-	7	7
4.	Kab. Bekasi	-	-	2	2	4
5.	Kota Bekasi	-	-	4	2	6
6.	Kab. Sukabumi	1	-	-	4	5
7.	Kota Sukabumi	-	-	4	-	4
8.	Kab. Cianjur	-	5	-	10	15
9.	Kab. Purwakarta	-	-	1	7	8
10.	Kab. Subang	-	-	3	-	3
11.	Kab. Karawang	-	-	2	1	3
12.	Kab. Bandung	-	-	1	4	5
13.	Kota Bandung	-	1	-	10	11
14.	Kab. Bandung Barat	-	-	1	9	10
15.	Kota Cimahi	-	-	3	3	6
16.	Kab. Sumedang	-	-	1	5	6
17.	Kab. Garut	-	-	6	-	6
18.	Kab. Tasikmalaya	-	-	3	-	3
19.	Kota Tasikmalaya	-	-	4	-	4
20.	Kab. Ciamis	-	-	9	1	10
21.	Kota Banjar	-	-	-	3	3
22.	Kab Majalengka	-	-	-	8	8
23.	Kab. Kuningan	-	-	-	6	6
24.	Kab. Cirebon	-	-	1	5	6
25.	Kota Cirebon	-	-	2	5	7
26.	Kab. Indramayu	-	1	-	5	6
Jumlah		1	8	49	110	168
%		0,60%	4,76%	29,17%	65,48%	100,00%

2.1.3. Manfaat Diklat Bahasa Daerah di Provinsi

Sekecil apa pun sebuah kegiatan pendidikan dan pelatihan pasti menyimpan manfaat. Hal ini disikapi sama oleh guru-guru. Mereka menyatakan bahwa diklat bahasa daerah bermanfaat (43,87%), sangat bermanfaat (41,29%), cukup bermanfaat (14,19%), dan tidak bermanfaat (0,65%).

Tabel 4: Manfaat Diklat Bahasa Daerah di Provinsi

No	Kab/Kota	ASPEK				F
		A	B	C	D	
1.	Kab. Bogor	-	-	6	-	6
2.	Kota Bogor	-	-	4	3	7
3.	Kota Depok	-	-	5	1	6
4.	Kab. Bekasi	-	-	2	2	4
5.	Kota Bekasi	-	-	4	2	6
6.	Kab. Sukabumi	-	-	4	-	4
7.	Kota Sukabumi	-	-	4	-	4
8.	Kab. Cianjur	-	8	-	7	15
9.	Kab. Purwakarta	-	-	1	7	8
10.	Kab. Subang	-	-	3	5	8
11.	Kab. Karawang	-	-	2	1	3
12.	Kab. Bandung	-	-	1	4	5
13.	Kota Bandung	-	-	3	1	4
14.	Kab. Bandung Barat	-	-	4	2	6
15.	Kota Cimahi	-	-	3	3	6
16.	Kab. Sumedang	-	-	3	1	4
17.	Kab. Garut	-	-	6	-	6
18.	Kab. Tasikmalaya	-	-	3	-	3
19.	Kota Tasikmalaya	-	-	4	-	4
20.	Kab. Ciamis	-	9	-	-	9
21.	Kota Banjar	-	-	-	3	3
22.	Kab Majalengka	1	1	1	6	9
23.	Kab. Kuningan	-	-	-	6	6
24.	Kab. Cirebon	-	2	3	2	7
25.	Kota Cirebon	-	1	2	3	6
26.	Kab. Indramayu	-	1	-	5	6
Jumlah		1	22	68	64	155
%		0,65%	14,19%	43,87%	41,29%	100,00%

2.1.4. Urgensi Kegiatan Apresiasi Bahasa dan Seni Daerah di Provinsi

Kegiatan apresiasi bahasa dan seni daerah pada tingkat provinsi memberikan kebanggaan tersendiri bagi para siswa dan guru di sekolah. Oleh karena itu, guru-guru menyatakan bahwa kegiatan tersebut memiliki peran yang penting (40,61%), sangat penting (49,70%), cukup penting (9,09%), dan tidak penting (0,61%).

Tabel 5: Urgensi Kegiatan Apresiasi Bahasa dan Seni Daerah di Provinsi

No	Kab/Kota	ASPEK				F
		A	B	C	D	
1.	Kab. Bogor	-	1	1	6	8
2.	Kota Bogor	-	-	1	7	8
3.	Kota Depok	-	-	1	5	6
4.	Kab. Bekasi	-	-	2	2	4
5.	Kota Bekasi	-	-	4	2	6
6.	Kab. Sukabumi	-	-	2	2	4
7.	Kota Sukabumi	-	-	4	4	8
8.	Kab. Cianjur	-	-	7	6	13
9.	Kab. Purwakarta	-	-	1	7	8
10.	Kab. Subang	-	-	3	5	8
11.	Kab. Karawang	-	-	2	1	3
12.	Kab. Bandung	-	-	1	4	5
13.	Kota Bandung	-	-	3	1	4
14.	Kab. Bandung Barat	-	-	4	2	6
15.	Kota Cimahi	-	-	3	3	6
16.	Kab. Sumedang	-	-	3	1	4
17.	Kab. Garut	-	-	6	-	6
18.	Kab. Tasikmalaya	-	-	3	-	3
19.	Kota Tasikmalaya	-	-	4	-	4
20.	Kab. Ciamis	-	9	-	-	9
21.	Kota Banjar	-	-	-	3	3
22.	Kab Majalengka	1	2	1	6	10
23.	Kab. Kuningan	-	-	-	6	6
24.	Kab. Cirebon	-	1	4	2	7
25.	Kota Cirebon	-	1	4	3	8
26.	Kab. Indramayu	-	1	3	4	8
Jumlah		1	15	67	82	165
%		0,61%	9,09%	40,61%	49,70%	100,00%

2.1.5. Penerapan Hasil Diklat Bahasa Daerah di Sekolah

Hasil pelatihan dan pendidikan bahasa daerah harus bermanfaat dan diterapkan. Guru-guru menyatakan bahwa hasil diklat bahasa daerah telah diterapkan (30,64%), sering diterapkan (26,59%), sedang diterapkan (37,57%), dan belum diterapkan (5,20%).

Tabel 6: Penerapan Hasil Diklat Bahasa Daerah di Sekolah

No	Kab/Kota	ASPEK				F
		A	B	C	D	
1.	Kab. Bogor	-	5	3	-	8
2.	Kota Bogor	-	5	2	-	7
3.	Kota Depok	1	2	1	3	7
4.	Kab. Bekasi	-	3	2	1	6
5.	Kota Bekasi	-	-	4	2	6
6.	Kab. Sukabumi	1	1	1	2	5
7.	Kota Sukabumi	-	8	1	-	9
8.	Kab. Cianjur	-	12	1	1	14
9.	Kab. Purwakarta	-	-	1	7	8
10.	Kab. Subang	-	-	3	5	8
11.	Kab. Karawang	-	-	2	1	3
12.	Kab. Bandung	-	-	1	4	5
13.	Kota Bandung	-	10	1	-	11
14.	Kab. Bandung Barat	-	3	2	3	8
15.	Kota Cimahi	-	-	3	3	6
16.	Kab. Sumedang	-	-	3	1	4
17.	Kab. Garut	-	-	6	-	6
18.	Kab. Tasikmalaya	-	-	3	-	3
19.	Kota Tasikmalaya	-	-	4	-	4
20.	Kab. Ciamis	7	-	-	2	9
21.	Kota Banjar	-	6	3	-	9
22.	Kab Majalengka	-	1	-	7	8
23.	Kab. Kuningan	-	2	3	-	5
24.	Kab. Cirebon	-	2	1	1	4
25.	Kota Cirebon	-	3	2	-	5
26.	Kab. Indramayu	-	2	-	3	5
Jumlah		9	65	53	46	173
%		5,20%	37,57%	30,64%	26,59%	100,00%

2.1.6. Pengiriman Peserta Diklat Bahasa Daerah ke Provinsi

Peserta diklat bahasa daerah adalah guru-guru bahasa daerah di seluruh Jawa Barat. Guru-guru merasakan bahwa pengiriman peserta diklat rata-rata kurang merata (30,33%), tidak merata (22,27%), cukup merata (20,85%), dan merata (26,54%).

Tabel 7: Pengiriman Peserta Diklat Bahasa Daerah ke Provinsi

No	Kab/Kota	ASPEK				F
		A	B	C	D	
1.	Kab. Bogor	5	2	1	1	9
2.	Kota Bogor	5	1	2	-	8
3.	Kota Depok	5	2	3	1	11
4.	Kab. Bekasi	1	1	3	1	6
5.	Kota Bekasi	4	2	-	2	8
6.	Kab. Sukabumi	3	-	1	1	5
7.	Kota Sukabumi	4	-	2	4	10
8.	Kab. Cianjur	2	7	5	1	15
9.	Kab. Purwakarta	-	1	7	-	8
10.	Kab. Subang	-	5	2	1	8
11.	Kab. Karawang	-	-	4	-	4
12.	Kab. Bandung	2	1	2	5	10
13.	Kota Bandung	10	1	-	-	11
14.	Kab. Bandung Barat	5	-	1	5	11
15.	Kota Cimahi	1	4	3	2	10
16.	Kab. Sumedang	-	-	2	4	6
17.	Kab. Garut	-	-	3	5	8
18.	Kab. Tasikmalaya	1	1	-	4	6
19.	Kota Tasikmalaya	2	1	-	4	7
20.	Kab. Ciamis	7	-	-	2	9
21.	Kota Banjar	-	7	1	1	9
22.	Kab Majalengka	-	3	-	5	8
23.	Kab. Kuningan	2	2	2	-	6
24.	Kab. Cirebon	3	2	-	2	7
25.	Kota Cirebon	2	1	-	2	5
26.	Kab. Indramayu	-	3	-	3	6
Jumlah		64	47	44	56	211
%		30,33%	22,27%	20,85%	26,54%	100,00%

2.1.7. Arah Diklat Bahasa Daerah

Diklat bahasa daerah jelas diperlukan guru-guru. Mereka mengharapkan arah diklat bahasa daerah itu pada aspek bahan ajar (3,59%), metodologi pembelajaran (15,38%), buku sumber dan media belajar (21,54%), serta semua aspek pembelajaran (59,49).

Tabel 8: Arah Diklat Bahasa Daerah

No	Kab/Kota	ASPEK				F
		A	B	C	D	
1.	Kab. Bogor	3	1	-	4	8
2.	Kota Bogor	-	-	2	6	8
3.	Kota Depok	1	2	-	4	7
4.	Kab. Bekasi	-	3	2	1	6
5.	Kota Bekasi	-	-	4	2	6
6.	Kab. Sukabumi	1	1	1	2	5
7.	Kota Sukabumi	-	-	-	9	9
8.	Kab. Cianjur	-	1	2	12	15
9.	Kab. Purwakarta	-	-	1	7	8
10.	Kab. Subang	-	-	1	7	8
11.	Kab. Karawang	-	-	-	4	4
12.	Kab. Bandung	-	-	1	4	5
13.	Kota Bandung	-	10	1	-	11
14.	Kab. Bandung Barat	-	3	2	3	8
15.	Kota Cimahi	-	-	-	10	10
16.	Kab. Sumedang	-	-	-	6	6
17.	Kab. Garut	-	-	6	-	6
18.	Kab. Tasikmalaya	1	-	1	5	7
19.	Kota Tasikmalaya	-	1	5	1	7
20.	Kab. Ciamis	1	1	-	8	10
21.	Kota Banjar	-	6	3	-	9
22.	Kab Majalengka	-	1	-	7	8
23.	Kab. Kuningan	-	-	-	6	6
24.	Kab. Cirebon	-	-	4	1	5
25.	Kota Cirebon	-	-	5	2	7
26.	Kab. Indramayu	-	-	1	5	6
Jumlah		7	30	42	116	195
%		3,59%	15,38%	21,54%	59,49%	100,00%

2.1.8. Instruktur Diklat Bahasa Daerah

Diklat bahasa daerah ditujukan kepada guru-guru bahasa daerah. Menurut guru-guru, instruktur bahasa daerah sebaiknya dosen senior UPI (4,4,2%), budayawan Sunda (17,13%), sastrawan Sunda (34,25%), dan ketiga-tiganya (44,20%).

Tabel 9: Instruktur Diklat Bahasa Daerah

No	Kab/Kota	ASPEK				F
		A	B	C	D	
1.	Kab. Bogor	-	-	6	1	7
2.	Kota Bogor	-	1	1	6	8
3.	Kota Depok	-	-	7	1	8
4.	Kab. Bekasi	-	1	3	3	7
5.	Kota Bekasi	-	-	4	2	6
6.	Kab. Sukabumi	1	1	1	2	5
7.	Kota Sukabumi	-	8	1	-	9
8.	Kab. Cianjur	-	-	1	14	15
9.	Kab. Purwakarta	-	-	1	7	8
10.	Kab. Subang	-	-	3	5	8
11.	Kab. Karawang	-	-	2	1	3
12.	Kab. Bandung	-	-	1	4	5
13.	Kota Bandung	-	10	1	-	11
14.	Kab. Bandung Barat	-	3	2	3	8
15.	Kota Cimahi	-	-	3	3	6
16.	Kab. Sumedang	-	-	3	1	4
17.	Kab. Garut	-	-	6	-	6
18.	Kab. Tasikmalaya	-	-	3	-	3
19.	Kota Tasikmalaya	-	-	4	-	4
20.	Kab. Ciamis	7	-	-	2	9
21.	Kota Banjar	-	6	3	-	9
22.	Kab Majalengka	-	-	1	7	8
23.	Kab. Kuningan	-	-	-	6	6
24.	Kab. Cirebon	-	-	-	7	7
25.	Kota Cirebon	-	-	-	5	5
26.	Kab. Indramayu	-	1	5	-	6
Jumlah		8	31	62	80	181
%		4,42%	17,13%	34,25%	44,20%	100,00%

2.1.9 Mutu Pelaksanaan Diklat Bahasa Daerah

Guru-guru menyatakan bahwa mutu pelaksanaan pelatihan bahasa daerah tingkat provinsi Jawa Barat menunjukkan kurang bahan (3,76%), waktunya sempit (57,53%), monoton (22,04%), dan kurang profesional (16,67%).

Tabel 10: Mutu Pelaksanaan Diklat Bahasa Daerah

No	Kab/Kota	ASPEK				F
		A	B	C	D	
1.	Kab. Bogor	-	6	1	1	8
2.	Kota Bogor	1	4	-	-	5
3.	Kota Depok	1	6	-	-	7
4.	Kab. Bekasi	1	3	2	-	6
5.	Kota Bekasi	2	4	1	1	8
6.	Kab. Sukabumi	1	1	1	2	5
7.	Kota Sukabumi	-	8	1	-	9
8.	Kab. Cianjur	1	14	-	-	15
9.	Kab. Purwakarta	-	6	2	-	8
10.	Kab. Subang	-	1	6	-	7
11.	Kab. Karawang	-	-	1	7	8
12.	Kab. Bandung	-	-	1	4	5
13.	Kota Bandung	-	11	-	-	11
14.	Kab. Bandung Barat	-	4	2	-	6
15.	Kota Cimahi	-	-	3	3	6
16.	Kab. Sumedang	-	-	3	1	4
17.	Kab. Garut	-	1	-	7	8
18.	Kab. Tasikmalaya	-	-	3	-	3
19.	Kota Tasikmalaya	-	-	4	-	4
20.	Kab. Ciamis	-	8	1	-	9
21.	Kota Banjar	-	8	1	-	9
22.	Kab Majalengka	-	6	2	-	8
23.	Kab. Kuningan	-	7	1	-	8
24.	Kab. Cirebon	-	2	4	-	6
25.	Kota Cirebon	-	6	1	-	7
26.	Kab. Indramayu	-	1	-	5	6
Jumlah		7	107	41	31	186
%		3,76%	57,53%	22,04%	16,67%	100,00%

2.1.10. Pelaksanaan Diklat Bahasa Daerah Secara Bergiliran di Kab/Kota.

Selama ini diklat bahasa daerah tingkat provinsi dilaksanakan di Bandung. Apakah perlu dilaksanakan bergiliran di tiap kabupaten/kota? Guru-guru menyatakan bahwa pelaksanaan diklat bahasa daerah di tiap kabupaten/kota tidak perlu (1,68%), cukup perlu (7,26%), perlu (37,43%), dan sangat perlu (53,63%).

Tabel 11: Pelaksanaan Diklat Bahasa Daerah Secara Bergiliran di Kab/Kota.

No	Kab/Kota	ASPEK				F
		A	B	C	D	
1.	Kab. Bogor	-	1	2	5	8
2.	Kota Bogor	-	1	5	2	8
3.	Kota Depok	-	1	5	1	7
4.	Kab. Bekasi	-	3	2	1	6
5.	Kota Bekasi	1	1	1	2	5
6.	Kab. Sukabumi	-	2	1	2	5
7.	Kota Sukabumi	-	-	2	7	9
8.	Kab. Cianjur	-	-	-	15	15
9.	Kab. Purwakarta	-	-	2	6	8
10.	Kab. Subang	-	-	-	8	8
11.	Kab. Karawang	-	-	-	4	4
12.	Kab. Bandung	-	-	1	4	5
13.	Kota Bandung	-	-	6	4	10
14.	Kab. Bandung Barat	-	3	2	3	8
15.	Kota Cimahi	-	-	3	3	6
16.	Kab. Sumedang	-	-	3	1	4
17.	Kab. Garut	-	-	6	-	6
18.	Kab. Tasikmalaya	-	-	3	-	3
19.	Kota Tasikmalaya	-	-	4	-	4
20.	Kab. Ciamis	-	-	1	8	9
21.	Kota Banjar	1	1	6	1	9
22.	Kab Majalengka	-	-	2	6	8
23.	Kab. Kuningan	1	-	-	5	6
24.	Kab. Cirebon	-	-	5	2	7
25.	Kota Cirebon	-	-	4	1	5
26.	Kab. Indramayu	-	-	1	5	6
Jumlah		3	13	67	96	179
%		1,68%	7,26%	37,43%	53,63%	100,00%

2.2. Pendapat dan Usulan Guru

Berdasarkan angket yang disebarakan kepada guru bahasa daerah di Jawa Barat diperoleh pendapat dan saran yang diusulkan oleh para guru. Pendapat dan saran guru-guru bahasa daerah tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut.

2.2.1. Bahan Pelatihan Bahasa Daerah

Bahan pelatihan yang perlu diberikan kepada guru-guru, antara lain:

- (1) Pengayaan bahan ajar bahasa, sastra, dan aksara daerah;
- (2) penggunaan media pembelajaran bahasa daerah;
- (3) metode pembelajaran yang mutakhir, baik untuk wilayah priangan maupun wilayah Pantura dan Bodebek;
- (4) Penjabaran kurikulum dengan jelas dan operasional;
- (5) Bahan ajar yang mengacu kepada pembentukan karakter orang Sunda;
- (6) CD bahan ajar dan model pembelajaran bahasa daerah.

2.2.2. Bentuk Kegiatan Peningkatan Mutu Pembelajaran Bahasa Daerah

Bentuk kegiatan yang paling efektif dan efisien dilaksanakan untuk meningkatkan mutu guru, antara lain:

- (1) pengembangan metode nyata serta apresiasi bahasa, sastra, dan seni daerah;
- (2) demonstrasi dan praktek pengajaran bahasa dan berbahasa daerah dengan berbagai model;
- (3) workshop pembelajaran bahasa daerah;
- (4) pendidikan dan pelatihan guru bahasa daerah, tembang, pupuh, biantara, presenter;
- (5) Tukar pikiran masalah-masalah bahasa, sastra, aksara, dan seni daerah.

2.2.3. Koordinasi Pengajar dan Pembelajaran Bahasa Daerah

Koordinasi tiap daerah serta MGMP Bahasa Daerah perlu dilaksanakan di setiap kabupaten/kota dengan koordinator Balai Pengembangan Bahasa Daerah (BPBD) Disdik Jawa Barat karena

- (1) Sebagai penampung aspirasi guru mengenai pembelajaran di daerah masing-masing sehingga bahan ajar sesuai dengan keadaan setempat;
- (2) Terjalannya kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- (3) Perlu dibentuk KKG Bahasa Daerah di SD/MI;
- (4) Perlu agar MGMP se-Jawa Barat dapat diarahkan kepada satu perspekrif dalam pembelajaran bahasa daerah.

2.2.4. Pelaksanaan Diklat Bahasa Daerah di Setiap Kota/Kabupaten

Pelatihan dan lokakarya bahasa daerah tingkat provinsi sangat baik dilakukan keliling di tiap kabupaten/kota karena

- (1) sebagai bentuk penyegaran diklat bahasa daerah;
- (2) sebagai bentuk jemput bola oleh BPBD Disdik Jawa Barat;
- (3) MGMP daerah terpicu dan terpacu dalam kegiatan.

2.2.5. Pemediasian/Pemasilitasan Kegiatan Pembelajaran Bahasa Daerah

Kegiatan yang dapat dan harus dimediasi atau difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, antara lain:

- (1) pelatihan guru bahasa daerah;
- (2) apresiasi bahasa dan seni daerah;
- (3) sosialisasi kebijakan pembelajaran bahasa daerah kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang kebijakan di daerah;

- (4) Pertemuan MGMP tingkat provinsi yang diikuti oleh peserta MGMP tingkat kabupaten/kota;
- (5) Penyediaan media dan sumber belajar bahasa daerah;
- (6) Lomba apresiasi bahasa dan seni daerah;
- (7) Workshop pembuatan alat peraga pembelajaran bahasa daerah;
- (8) Lesson Plan pembelajaran bahasa daerah;
- (9) Training of Trainer (TOT) pembelajaran bahasa daerah di LPMP sehingga ada guru inti bahasa daerah di tingkat provinsi;
- (10) Kegiatan budaya membaca bahasa Sunda dan kebijakan wajib berbahasa Sunda.

BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

3.1. Simpulan

Pengkajian ini telah menganalisis dan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan mutu guru bahasa, sastra, dan aksara daerah di sekolah di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

a. Peningkatan mutu guru bahasa daerah.

- (1) Rata-rata guru jarang mengikuti penataran bahasa dan sastra Sunda.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bahasa daerah di tingkat provinsi masih sangat perlu dilakukan.
- (3) Diklat bahasa daerah masih sangat bermanfaat bagi guru-guru di daerah.
- (4) Kegiatan apresiasi bahasa dan seni daerah pada tingkat provinsi memberikan kebanggaan tersendiri bagi para siswa dan guru di sekolah sehingga masih sangat dilaksanakan.
- (5) Hasil pelatihan dan pendidikan bahasa daerah harus bermanfaat dan diterapkan. Guru-guru menyatakan bahwa hasil diklat bahasa daerah telah dan sedang diterapkan di sekolah.
- (6) Pengiriman peserta diklat rata-rata kurang merata, sering orang yang sama dan dekat dengan dinas pendidikan.
- (7) Arah diklat bahasa daerah mengacu kepada berbagai aspek pembelajaran.
- (8) Instruktur bahasa daerah sebaiknya dari dosen UPI, dibarengi sastrawan dan budayawan daerah.
- (9) Pelaksanaan diklat bahasa daerah waktunya sempit dan monoton serta kurang profesional.
- (10) Pelaksanaan diklat bahasa daerah di tiap kabupaten/kota sangat perlu dilaksanakan.

3.2. Saran

Berdasarkan simpulan di atas dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut.

- a. Diklat bahasa daerah di tingkat provinsi perlu sering dilakukan dengan peserta yang merata.
- b. Penerapan hasil diklat bahasa daerah perlu monitoring yang nyata dan sering.
- c. Bahan diklat daerah sebaiknya berupa bahan ajar, media dan metode pembelajaran yang mutakhir.
- d. Instruktur pelatihan sebaiknya dosen senior UPI ditambah sastrawan dan budayawan Sunda.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul. Aspandi. 1986. *Sikap Bahasa: Perilaku Manusia Indonesia dalam Berbahasa*. Jakarta: Tunas Bangsa.
- Arikunto, Suharsimi. 1986. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bina Aksara.
- Balai Pengembangan Bahasa Daerah (BPBD). 2003. "Identifikasi dan Pengkajian Bahasa daerah di Jawa Barat untuk Pembelajaran di Sekolah". Bandung: Dinas Disdik.
- Depdiknas RI. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Sekjen Depdiknas.
- Depdikbud Propinsi Jawa Barat. 1994. *Kurikulum 1994 GBPP Bahasa dan Sastra Sunda*. Bandung: Geger Sunten.
- Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. 2004. *Kurikulum 2004: Standar Kompetensi Bahasa dan Sastra Sunda SD/MI dan SMP/MTs*. Bandung:
- Edwards, Allen L. 1957. *Techniques of Attitude Scale Construction*. New York: Appleton- Century-Cofts.
- Halim, Amran. 1980 *Politik Bahasa Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Halim, Amran & Burhan, Jasir. 1982 *Ujian Bahasa*. Jakarta: Wira Nurbakti.
- Moeliono, Anton M. 1981. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.
- Moeliono, Anton M. 1988. "Sikap Bahasa yang Bertalian dengan Usaha Pengembangan dan Pembinaan Bahasa". Makalah Kongres Bahasa Indonesia V di Jakarta.
- Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat. 2002. *Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 51 Tahun 2002* tentang "Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas pada Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat".

- Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat. 2003. *Perda Nomor 5 Tahun 2003* tentang “Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah”.
- Prawirasumantri, Abud. 1993. “Ngaronjatkeun Sikep Basa Panyatur Basa Sunda”. Bandung: Kongres Basa Sunda V.
- Prawirasumantri, Abud dkk. 2003. *Pedoman Pengembangan KBK Bahasa Daerah (Sunda) untuk Guru SD dan SMP*. Bandung: Geger Sunten.
- Ramirez, Arnulfo G. 1985. “Attitudes toward Language and Cultural Groups” dalam *Bilingualisme through Schooling*”. Albany: State University of New York Press.
- Rusyana, Yus. 1984. *Bahasa dan Sastra dalam Gamitan Pendidikan*. Bandung: Diponegoro.
- Rusyana, Yus. 1982. *Metode Pengajaran Sastra*. Bandung: Gunung Larang.
- Sidi, Indra Djati. 2002. *Menuju Masyarakat Belajar*. Jakarta: Paramadina.
- Stevens, Peter. 1980. *Teaching English as an International Language*. New York: Pergamon Press.
- Subyakto-Nababan, Sri Utari. 1988. *Metodologi Pengajaran Bahasa*. Jakarta: P3LPTK.
- Sudaryat, Yayat. 2002. “Masalah Pengajaran Bahasa Sunda di Sekolah”. Bandung: Makalah Konferensi Internasional Budaya Sunda (KIBS) I.
- Suhardi, Basuki. 1993. “Pengembangan Sikap Positif dalam Berbahasa Indonesia” Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI di Jakarta.

Lampiran

**MONITORING DAN EVALUASI
KEGIATAN PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN
BAHASA DAN SENI DAERAH DI SEKOLAH
DI JAWA BARAT**

ANGKET

Nama :

Asal Sekolah : SD/SMP/SMA

Kecamatan :

Kab/Kota :

**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
BALAI PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH
Jl. Dr. Rajiman No. 6 Bandung**

ANGKET GURU SD, SMP, DAN SMA

Petunjuk

1. Angket ini sangat berguna bagi pembinaan dan pengembangan pengajaran bahasa daerah di Jawa Barat.
2. Isilah dan jawablah angket ini sejujur-jujurnya.
3. Angket ini tidak berpengaruh kepada status dan jabatan Ibu/Bapak sebagai guru. Akan tetapi, turut menentukan pengembangan pengajaran bahasa daerah.
4. Dalam beberapa tanya, jawaban dapat dipilih lebih dari satu. Ibu/Bapak dapat memilih sesuai kenyataan di lapangan.

A. KEGIATAN PENINGKATAN MUTU GURU DALAM PEMAHAMAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA DAERAH DI SEKOLAH

A.1. Peningkatan Mutu Guru

1. Berapa kali Saudara mengikuti pelatihan bahasa daerah di tingkat provinsi?
 - a. belum pernah
 - b. dua kali
 - c. satu kali
 - d. sering
2. Apakah pendidikan dan pelatihan bahasa daerah di tingkat provinsi masih perlu dilakukan?
 - a. tidak perlu
 - b. perlu
 - c. cukup perlu
 - d. sangat perlu
3. Apakah pelatihan bahasa daerah di tingkat provinsi bermanfaat bagi Saudara?
 - a. tidak bermanfaat
 - b. bermanfaat
 - c. cukup bermanfaat
 - d. sangat bermanfaat
4. Apakah kegiatan apresiasi bahasa dan seni daerah di tingkat provinsi masih perlu

dilanjutkan?

- a. tidak perlu
- b. perlu
- c. masih perlu
- d. sangat perlu

5. Apakah hasil pelatihan bahasa daerah telah diterapkan di sekolah?

- a. belum diterapkan
- b. sedang diterapkan
- c. telah diterapkan
- d. sering diterapkan

6. Pengiriman peserta pelatihan bahasa daerah di tingkat Provinsi Jawa Barat

- a. kurang merata
- b. tidak merata
- c. merata
- d. cukup merata

7. Ke mana arah pelatihan bahasa daerah yang Saudara perlukan?

- a. bahan ajar
- b. metodologi
- c. Buku sumber dan media belajar
- d. semuanya

8. Sebaiknya instruktur pelatihan bahasa daerah adalah

- a. dosen senior dari UPI
- b. budayawan Sunda
- c. Sastrawan Sunda
- d. semuanya

9. Mutu pelaksanaan pelatihan bahasa daerah tingkat provinsi Jawa Barat

- a. kurang bahan
- b. waktunya sempit
- c. monoton
- d. kurang profesional

10. Apakah perlu pelatihan bahasa daerah dilaksanakan secara bergiliran di tiap kabupaten/kota?

- a. tidak perlu
- b. cukup perlu
- c. perlu
- d. Sangat perlu

A.2. Saran/Pendapat

1. Menurut pendapat Saudara, bahan pelatihan apa yang perlu disajikan oleh para instruktur bahasa daerah?

.....
.....
.....

2. Bentuk kegiatan apa yang paling efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu pembelajaran bahasa dan sastra daerah?

.....
.....
.....

3. Apakah perlu ada rapat koordinasi tiap daerah atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) bahasa Daerah dengan koordinator BPBD Disdik Jabar?

.....
.....
.....

4. Bagaimana pendapat Saudara jika pelatihan dan lokakarya bahasa daerah Tingkat Jawa Barat dilaksanakan keliling di tiap kabupaten/kota, panitiannya MGMP dengan bantuan BPBD Disdik Jabar?

.....
.....
.....

5. Kegiatan apa yang harus difasilitasi atau dimediasi oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat berkaitan dengan pengajaran bahasa daerah di sekolah?

.....
.....
.....



**KEGIATAN PENINGKATAN MUTU GURU
DALAM PEMAHAMAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA DAERAH
DI SEKOLAH JAWA BARAT**

LAPORAN EVALUASI

**BALAI PENGEMBANGAN BAHASA DAERAH
DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA BARAT
2005**

**KEGIATAN PENINGKATAN MUTU GURU
DALAM PEMAHAMAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA DAERAH
DI SEKOLAH JAWA BARAT**

Penanggung Jawab : Drs. H. Idin Baidilah, M.Pd
Kepala Balai Pengembangan Bahasa Daerah

Pimpinan Pelaksana : Drs. Bambang Sulaksono
Kepala Bidang Pengkajian BPBD

Pengolah Data : Dr. Yayat Sudaryat, M.Hum.

Mengetahu

Kepala BPBD
Disdik Provinsi Jawa Barat,

Pimpinan Proyek
BPBD Disdik Jawa Barat,

Drs. H. Idin Baidilah, M.Pd.

Drs. Bambang Sulaksono

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nyalah laporan hasil perngkajian “Peningkatan Mutu Guru Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Sunda) di Jawa Barat” ini dapat dirampungkan.

Isi laporan pengkajian ini terdiri atas lima bab. Setelah Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang Latar Belakang pengkajian, Rumusan Masalah, Tujuan Pengkajian, Manfaat Pengkajian, dan Sasaran Pengkajian; dalam Bab II Deskripsi Hasil Pengkajian yang berisi sikap terhadap (1) Penyelenggaraan Pembelajaran Bahasa Sunda di TK/RA dan SMA/SMK/MA, (2) . Sebagai penutup, pada Bab III Simpulan dan Saran.

Kegiatan peningkatan mutu guru bahasa, sastra, dan aksara daerah (Sunda) di Propinsi Jawa Barat ini dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Bahasa Daerah (BPBD) Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat. Dalam pengolahan dan penyusunan hasil pengkajian ini dibantu oleh Konsultan dari Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FPBS UPI Bandung. Untuk kerjasamanya tersebut, kami ucapkan terima kasih.

Laporan hasil pengkajian ini masih jauh dari sempurna, bahkan banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini sangatlah dinanti-nantikan. Akhirul kata, kami berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama sebagai informasi sementara mengenai sikap guru-guru terhadap penggunaan dan pembelajaran bahasa daerah (Sunda) pada Pendidikan Dasar di Jawa Barat.

Bandung, Juli 2005

Pimpinan Pelaksana Proyek,

Drs. Bambang Sulaksono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Pengkajian.....	1
1.2 Rumusan Masalah Pengkajian.....	3
1.3 Tujuan Pengkajian.....	4
1.4 Manfaat Pengkajian.....	4
1.5 Sasaran dan Sumber Pengkajian.....	6
1.6 Metodologi Pengkajian	
BAB II PENGKAJIAN PENINGKATAN MUTU GURU BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA DAERAH	
4.0 Pengantar.....	23
4.1	
BAB III SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	76
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN	83

2.2. Pendapat dan Usulan Guru

Berdasarkan angket yang disebarakan kepada guru bahasa daerah di Jawa Barat diperoleh pendapat dan saran yang diusulkan oleh para guru. Pendapat dan saran guru-guru bahasa daerah tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut.

Pertama, bahan pelatihan yang perlu diberikan kepada guru-guru adalah bahan ajar, media pembelajaran, dan metode pembelajaran yang mutakhir.

Kedua, bentuk kegiatan yang paling efektif dan efisien dilaksanakan untuk meningkatkan mutu guru adalah pengembangan metode nyata serta apresiasi bahasa, sastra, dan seni daerah.

Ketiga, koordinasi tiap daerah serta MGMP Bahasa Daerah perlu dilaksanakan di setiap kabupaten/kota dengan koordinator Balai Pengembangan Bahasa Daerah (BPBD) Disdik Jawa Barat.

Keempat, pelatihan dan lokakarya bahasa daerah tingkat provinsi sangat bagus dilakukan keliling di tiap kabupaten/kota sebagai bentuk penyegaran dan jemput bola oleh BPBD Disdik Jawa Barat.

Kelima, kegiatan yang dapat dan harus dimediasi atau difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah (1) pelatihan guru bahasa daerah, (2) apresiasi bahasa dan seni daerah, dan (3) sosialisasi pembelajaran bahasa daerah kepada pemerintah kabupaten/kota sebagai pemegang kebijakan di daerah.